



LAPORAN KINERJA

UPT PUSKESMAS TIBAN BARU

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2025. Dokumen ini merupakan bentuk komitmen nyata UPT Puskesmas Tiban Baru dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Laporan Kinerja adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu triwulan anggaran. Kinerja Dinas Kesehatan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk laporan ini. Demikian Laporan Kinerja ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak- pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Batam, 10 Januari 2026
Kepala UPT
Puskesmas Tiban Baru



dr. Hilda Insyafri
Pembina / IVa
NIP. 19770215 201001 2 003

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR.....	-i-
DAFTAR ISI.....	-ii-
DAFTAR TABEL.....	-iii-
BAB 1 PENDAHULUAN.....	
I. Latar Belakang.....	1
II. Tujuan.....	2
III. Gambaran Umum.....	2
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....	
I. Indikator Kinerja Utama.....	8
II. Perjanjian Kinerja.....	8
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	
I. Pengukuran Kinerja.....	13
II. Realisasi Anggaran.....	15
BAB 4 PENUTUP	19

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1. Jumlah Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan di UPT Puskesmas Tiban Baru Tahun 2025.....	5
Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2030.....	8
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Kepala Puskesmas Tahun 2025.....	9
Tabel 4. Program, Kegiatan dan Anggaran UPT Puskesmas Tiban Baru Tahun 2025.	10
Tabel 5. Pengukuran Kinerja TW IV Tahun 2025.....	14
Tabel 6. Realisasi Anggaran 2025.....	16
Tabel 7. Analisa Masalah dan Rencana Tindak Lanjut.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu suatu konsep tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip antara lain: keterbukaan/transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, responsivitas dan menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi serta membuka partisipasi masyarakat. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan agar setiap organisasi publik termasuk UPT Puskesmas Tiban Baru dapat menjaga keselarasan antara tradisi, proses pengambilan keputusan, kemampuan pegawai serta kebutuhan seluruh stakeholder utamanya masyarakat luas sehingga menjadi organisasi yang berkinerja tinggi.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih dan bebas dari KKN. Untuk itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UPT Puskesmas Tiban Baru juga dituntut untuk mempertanggungjawaban penyelenggaraan perencanaan dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Penerapan sistem akuntabilitas yang dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja UPT Puskesmas Tiban Baru Tahun 2025 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya pencapaian visi UPT Puskesmas Tiban Baru "Mewujudkan Masyarakat Tiban Baru dan Tiban Lama Yang Mandiri, Sehat dan Berkualitas Tahun 2026".

II. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat pencapaian atas pelaksanaan kinerja program dan kegiatan
2. Untuk mengetahui konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan
3. Untuk mengevaluasi permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan program dan kegiatan.

III. Gambaran Umum

1. Struktur Organisasi

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Tiban Baru merupakan perwujudan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pelaksana bidang kesehatan kepada masyarakat. Puskesmas yang dilakukan secara cepat, akurat, dan paripurna mencerminkan kinerja yang baik dari Pemerintah Daerah dalam melayani masyarakatnya khususnya dalam bidang kesehatan. Untuk memperoleh kinerja puncak bidang kesehatan tersebut diperlukan tata kelola Puskesmas yang maksimal.

Pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan

organisasi Puskesmas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dengan sebagai berikut:

- 1) Kepala Puskesmas
- 2) Kepala Tata Usaha - Penanggung Jawab Klaster I Manajemen
 - a) Koordinator Manajemen Sarana, Prasarana dan Perbekalan Kesehatan
 - b) Koordinator Manajemen Arsip/ Ketatausahaan
 - c) Koordinator Manajemen Sumber Daya Manusia
 - d) Koordinator Manajemen Mutu Pelayanan
 - Penanggung Jawab Audit Internal
 - Penanggung Jawab PPI (Pengendalian Infeksi)
 - Penanggung Jawab Manajemen Fasilitas dan Keselamatan
 - Penanggung Jawab Manajemen Risiko
 - Penanggung Jawab Keselamatan Pasien
 - Penanggung Jawab Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 - e) Koordinator Manajemen Keuangan dan Aset/BMD
 - Bendahara Penerimaan
 - Bendahara Pengeluaran
 - Pengurus Barang
 - Bendahara Dana DAK Non Fisik
 - f) Koordinator Manajemen Sistem Informasi Digital
 - PWS Kelurahan Tiban Baru/ PJ ILP Pustu Posyandu
 - PWS Kelurahan Tiban Lama/PJ ILP Pustu Posyandu
 - Rekam Medis (e-RM)
 - Satu Sehat
 - g) Koordinator Promosi Kesehatan
 - h) Koordinator Manajemen Jejaring
- 3) Penanggung Jawab Klaster II Ibu dan Anak
 - a) Koordinator Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas (BIKOR)

- b) Koordinator Balita dan Anak Pra Sekolah
 - c) Koordinator Usia Sekolah dan Remaja
- 4) Penanggung Jawab Klaster III Dewasa dan Lansia
 - a) Koordinator Usia Dewasa
 - b) Koordinator Lansia
- 5) Penanggung Jawab Klaster IV Penanggulangan Penyakit Menular
 - a) Koordinator Kesehatan Lingkungan
 - b) Koordinator Surveilans dan Respon (ILI, Pneumonia, ISPA, Diare, BDB, HMFD dll)
- 6) Penanggung Jawab Lintas Klaster
 - a) Koordinator Promosi Kesehatan
 - b) Koordinator Pelayanan Gawat Darurat
 - c) Koordinator Pelayanan Kefarmasian
 - d) Koordinator Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
 - e) Koordinaator Pelayanan Gigi dan Mulut

2. Tugas dan Fungsi Pokok Puskesmas

Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama memiliki tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat serta memiliki fungsi yang penting dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional. Fungsi penting tersebut antara lain:

1. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
2. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Adapun tugas pokok Puskesmas Tiban Baru adalah:

- I. Memberikan pelayanan kesehatan dasar yang paripurna
- II. Melaksanakan kegiatan pengobatan (**Kuratif**), pencegahan (**Preventif**), promosi (**Promotif**), dan pemulihan kesehatan (**Rehabilitatif**)
- III. Membuat pencatatan dan pelaporan (**Reporting dan Recording**)

Dalam hal ini puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dalam bentuk pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Data jumlah kunjungan pasien Puskesmas Tiban Baru Tahun 2025 adalah 28.012 dengan rata-rata kunjungan perhari 90 orang (Profil Puskesmas Tiban Baru, 2025).

3. Sumber Daya Manusia

Puskesmas Tiban Baru pada tahun 2025 memiliki staf atau kepegawaian sebanyak 56 orang. Terdiri dari 51 orang ASN dan 5 orang tenaga honorer yang tersebar di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

Tabel 1. Jumlah Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan di UPT Puskesmas Tiban Baru Tahun 2025

No	Jenis Tenaga	Jumlah Pegawai		Jumlah Kebutuhan	Kesenjangan
		PNS	PPPK		
1	Kepala Puskesmas	1	0	1	0
2	Kepala Tata Usaha	1	0	1	0
3	Dokter Umum	5	1	7	1
4	Dokter Gigi	3	0	3	0
5	Sanitarian	1	1	2	0
6	Analisis Data dan Informasi	1	0	1	0
7	Operator Layanan Operasional	0	3	3	0
8	Penata Layanan Operasional	0	1	1	0
9	Pengelola Umum Operasional	0	1	1	0
10	Analisis Keuangan	0	0	2	2
11	Nutrisi	1	0	2	1
12	Perekam Medis	1	0	2	1
13	Bidan	8	7	30	15
14	Perawat	9	2	27	16
15	Pranata Laboratorium Kesehatan	1	0	3	2
16	Epidemiologi	0	0	1	1

	kesehatan				
17	Apoteker	1	0	2	1
18	Asisten Apoteker	2	0	2	0
19	Penata Kelola Layanan Kesehatan	0	0	1	0
20	Terapi Gigi dan Mulut	2	0	2	0
21	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	1	0	2	1
22	Penalaaah Teknis Kebijakan	1	0	1	0
	Jumlah	39	16	96	41

4. Isu-Isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi UPT Puskesmas Tiban Baru

Dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di UPT Puskesmas Tiban Baru tahun 2025, UPT Puskesmas Tiban Baru menghadapi dan mengalami beberapa kendala dan permasalahan dalam upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, permasalahan tersebut antara lain :

- a. Kurangnya tenaga administrasi di puskesmas sehingga banyak tenaga kesehatan (perawat, perawat gigi, bidan, sanitarian) merangkap tugas administrasi (bendahara dan administrasi lain) sehingga formasi tenaga fungsional yang ada tidak optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam jabatan fungsional.
- b. Sistem pencatatan dan pelaporan belum optimal terutama dari klinik atau praktek mandiri bidan.
- c. Perubahan pola hidup masyarakat yang menyebabkan kurangnya aktivitas fisik, peningkatan konsumsi makanan cepat saji sehingga menyebabkan peningkatan jumlah penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, kanker dan sebagainya.
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining penyakit tidak menular terutama skrining IVA untuk deteksi kanker serviks.
- e. Masih rendahnya cakupan penemuan tuberkulosis akibat kurangnya

pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ke Puskesmas jika ada keluhan batuk, belum maksimalnya upaya skrining di tempat umum dan perumahan serta keterbatasan petugas untuk melakukan penemuan kasus secara aktif di tempat yang beresiko.

Adapun langkah-langkah untuk mengatasi masalah dimaksud diantaranya :

- a. Mengajukan rencana kebutuhan tenaga administrasi kepada Dinas Kesehatan Kota Batam dan BKPSDM Kota Batam.
- b. Memperkuat koordinasi serta melakukan perbaikan dan optimalisasi sistem pencatatan dan pelaporan dari klinik dan bidan praktek mandiri.
- c. Melakukan edukasi kepada masyarakat melalui penyuluhan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial atau website Puskesmas.
- d. Tetap melaksanakan inovasi Konser Diva (Kontrasepsi Terintegrasi Pemeriksaan Sadanis dan IVA) untuk meningkatkan capaian deteksi kanker serviks dan payudara, sebagai upaya untuk menurunkan angka kejadian kanker terbanyak pada wanita.
- e. Tetap melaksanakan inovasi Gertak TB sebagai upaya untuk meningkatkan temuan kasus tuberkulosis di masyarakat dengan melibatkan peran aktif kader jumantuk untuk penemuan kasus secara aktif.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

I. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkannya Permenpan Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah. Berdasarkan permenpan ini, indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan secara berjenjang

Adapun indikator kinerja utama UPT Puskesmas Tiban Baru sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Puskesmas Tiban Baru nomor 26 tahun 2024 dengan rincian indikator tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya masyarakat sehat dan produktif sesuai siklus hidup	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD
2	Meningkatnya Kinerja Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi stunting
		Rata-rata capaian penerima layanan SPM Kesehatan Masyarakat
		Rata-rata capaian penerima layanan SPM Pencegahan Pengendalian Penyakit
		Jumlah kematian ibu
		Jumlah kematian balita
		Persentase lanjut usia yang mandiri
		Cakupan penemuan kasus TBC

		Cakupan imunisasi bayi lengkap
		Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total
		Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat
		Angka keberhasilan pengobatan TBC (TB success rate)
		Prevalensi Obesitas > 18 tahun
		Persentase Depresi pada usia ≥ 15 tahun
		Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis
		Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun
3	Meningkatnya kader posyandu dengan strata madya	Persentase kader posyandu strata madya

II. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan komitmen organisasi perangkat daerah yang akan dicapai dalam satu tahun. Kegiatan di tahun 2025 merupakan penjabaran dari sasaran yang akan dicapai sebagaimana renstra UPT Puskesmas Tiban Baru. Perjanjian kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana kinerja tahunan, yang didalamnya mencantumkan tujuan, sasaran, target kinerja dari indikator kinerja utama beserta anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana kerja yang telah disusun.

Adapun perjanjian kinerja tahun 2025 yang telah disusun ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Kepala Puskesmas Tahun 2025

No	Sasaran Strategi Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
I	Meningkatnya kinerja perangkat daerah dalam		100%

	penyelenggaraan urusan pemerintah daerah		
	Meningkatnya Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100%
II	Meningkatnya kinerja upaya kesehatan perorangan & upaya kesehatan masyarakat	Prevalensi stunting	13.8%
	Meningkatnya Kinerja Layanan Kesehatan Masyarakat	Rata-rata capaian penerima layanan SPM Kesehatan Masyarakat	96,99%
	Meningkatnya Kinerja Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	Rata-rata capaian penerima layanan SPM Pencegahan Pengendalian Penyakit	99,1%
	Berkurangnya jumlah kematian ibu	Jumlah kematian ibu	22 Orang
	Berkurangnya jumlah kematian balita	Jumlah kematian balita	196 Orang
	Meningkatnya lanjut usia yang mandiri	Persentase lanjut usia yang mandiri	81%
	Meningkatnya penemuan kasus TB	Cakupan penemuan kasus TBC	67%
	Meningkatnya bayi di imunisasi lengkap	Cakupan imunisasi bayi lengkap	92%
	Meningkatnya kelurahan STBM	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total	39,06%
	Meningkatnya tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat pengelolaan pangan	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	55%
	Meningkatnya kasus TB yang dinyatakan sembuh dan pengobatan lengkap	Angka keberhasilan pengobatan TBC (TB success rate)	81%
	Berkurangnya Obesitas usia > 18 tahun	Prevalensi Obesitas > 18 tahun	23,4%
	Berkurangnya Depresi	Persentase Depresi pada usia ≥ 15	0,5%

	pada usia $\geq$ 15 tahun	tahun	
	Meningkatnya penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	36%
	Berkurangnya penduduk usia 10-21 tahun merokok	Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun	12,4%
III	Meningkatnya kader posyandu dengan strata madya	Persentase kader posyandu strata madya	10%

Tabel 4. Program, Kegiatan dan Anggaran UPT Puskesmas Tiban Baru Tahun 2025

Program dan Kegiatan		Anggaran
Total Anggaran Puskesmas		Rp2.158.638.733,00
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp1.412.882.933,00
A	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp1.412.882.933,00
2	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp741.480.600,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp4.275.200,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah wujud kewajiban pertanggungjawaban instansi pemerintah secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas.

Laporan Kinerja berfungsi sebagai instrumen untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja yang taat asas, cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan. Selain itu akuntabilitas kinerja berfungsi sebagai alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi dan tugasnya sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja dan upaya untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk laporan

kinerja.

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas Perjanjian Kinerja (PK) UPT Puskesmas Tiban Baru. Perjanjian kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk pengukuran kinerja dan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh staf UPT Puskesmas Tiban Baru. Untuk selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (*performance result*) untuk mengetahui celah kinerja (*performance gap*). Atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalan. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target tahun berikutnya, dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja dimasa datang (*performance improvement*).

I. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran strategis yang telah ditentukan sebelumnya secara bertahap. Pengukuran kinerja merupakan penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian tersebut tidak lepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindak lanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran

kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun pengukuran kinerja tahun 2025 antara lain ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 5. Pengukuran Kinerja TW IV Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja TW 4		Realisasi
			Target	Capaian (%)	
1	Meningkatnya kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah				
	Meningkatnya Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD	100%	100	100
2	Meningkatnya kinerja upaya kesehatan perorangan & upaya kesehatan masyarakat	Prevalensi stunting	13,8%	2,48	100
	Meningkatnya Kinerja Layanan Kesehatan Masyarakat	Rata-rata capaian penerima layanan SPM Kesehatan Masyarakat	96,99	92,34	92,34
	Meningkatnya Kinerja Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	Rata-rata capaian penerima layanan SPM Pencegahan Pengendalian Penyakit	99,1	64,62	64,62
	Berkurangnya jumlah kematian ibu	Jumlah kematian ibu	22 orang	0	100

	Berkurangnya jumlah kematian balita	Jumlah kematian balita	196 orang	6	100
	Meningkatnya lanjut usia yang mandiri	Persentase lanjut usia yang mandiri	81	90	111,11
	Meningkatnya penemuan kasus TB	Cakupan penemuan kasus TBC	67	54	80,6
	Meningkatnya bayi di imunisasi lengkap	Cakupan imunisasi bayi lengkap	92	99	107,61
	Meningkatnya kelurahan STBM	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total	39,06	100	100
	Meningkatnya tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat pengelolaan pangan	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	55	70,89	128,89
	Meningkatnya kasus TB yang dinyatakan sembuh dan pengobatan lengkap	Angka keberhasilan pengobatan TBC (TB success rate)	81	98	120,99
	Berkurangnya Obesitas usia > 18 tahun	Prevalensi Obesitas > 18 tahun	23,4	14,99	135,94
	Berkurangnya Depresi pada usia ≥ 15 tahun	Persentase Depresi pada usia ≥ 15 tahun	0,50	0,42	116
	Meningkatnya	Cakupan	36	121,22	121,22

	penerima pemeriksaan kesehatan gratis	penerima pemeriksaan kesehatan gratis			
2	Berkurangnya penduduk usia 10-21 tahun merokok	Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun	12,4	1,52	187,74
	Meningkatnya kader posyandu dengan strata madya	Persentase kader posyandu strata madya	10	10	101,1
Total Capaian Kinerja					107,32

II. Realisasi Anggaran

Tabel 6. Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Anggaran	
			Realisasi	(%)
1	Meningkatnya Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD	1.293.796.243	91,57
2	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		689.506.966	92,99
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kader posyandu strata madya	4.173.200	97,16
Total Realisasi Anggaran			1.987.476.409	92,07%

Dari pengukuran kinerja ini maka dapat dilihat bahwa terdapat 3 indikator kinerja yang belum mencapai target, antara lain rata-rata capaian penerima layanan

SPM kesmas yakni cakupan pelayanan lansia, rata-rata capaian penerima layanan pencegahan pengendalian penyakit, yaitu cakupan pelayanan HIV dan cakupan penemuan kasus TBC.

Tabel 7. Analisa Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

No	Masalah	Analisa Masalah	Rencana Tindak Lanjut
1	Capaian usia lanjut yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar belum mencapai target	Belum tersedia rencana komunikasi khusus untuk kelompok lansia dan keterbatasan SDM kader untuk door-to-door	Membuat Inovasi Kelas Lansia
2	Terdapat kesenjangan persentase orang dengan resiko terinfeksi virus HIV mendapat pelayanan kesehatan	Tidak adanya lokasi hotspot di wilayah kerja	• Kerja sama dengan LSM dan jejaring terkait • Skrining aktif ke populasi kunci
3	Terdapat kesenjangan cakupan penemuan kasus TBC	Karena kurang pemahaman kontak dan keluarga tentang TB, adanya stigma, serta keterbatasan sarana pemeriksaan TB (alat, bahan, atau akses layanan).	• Edukasi TB saat investigasi kontak • Kunjungan rumah bersama kader • Penyebaran media KIE TB • Melakukan penencanaan kelurahan siaga TBC dengan melibatkan lintas sektor dan kader posyandu

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja UPT Puskesmas Tiban Baru merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2025.

Laporan ini dimaksudkan untuk menindak lanjuti Instruksi Presiden RI Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja.

UPT Puskesmas Tiban Baru sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota Batam yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat serta memiliki fungsi yang penting dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional.

Untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia maka disusun indikator kinerja utama Puskesmas tahun 2025-2030 yang mengacu kepada Rencana Strategis Puskesmas Tiban Baru tahun 2025-2030. Setelah penetapan indikator kinerja utama maka disusunlah perjanjian kinerja kepala puskesmas yang merupakan komitmen organisasi perangkat daerah yang akan dicapai dalam satu tahun. Kegiatan di tahun 2025 merupakan penjabaran dari sasaran yang akan dicapai sebagaimana renstra UPT Puskesmas Tiban Baru. Perjanjian kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana kinerja tahunan, yang didalamnya mencantumkan tujuan, sasaran, target kinerja dari indikator kinerja utama beserta anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana kerja yang telah disusun.

Setelah disusunnya perjanjian kinerja, maka setiap triwulan akan dibuat pengukuran kinerja setiap triwulan dan realisasi anggaran Puskesmas. Dari

pengukuran kinerja yang telah dilakukan didapatkan capaian kinerja Puskesmas Tiban Baru pada triwulan IV sebesar 107,32% dan realisasi anggaran sebesar 92,07%. Dari pengukuran kinerja ini maka dapat dilihat bahwa terdapat 3 indikator kinerja yang belum mencapai target, antara lain persentase usia lanjut mendapatkan pelayanan sesuai standar, persentase orang dengan resiko terinfeksi virus HIV mendapat pelayanan kesehatan, dan cakupan penemuan kasus TBC.